



WALIKOTA PRABUMULIH

PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH

NOMOR **63** TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH KOTA PRABUMULIH

TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PRABUMULIH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2023 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Pasal 2

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 972.057.846.870,00 yang bersumber dari:

- (1) Pendapatan Asli Daerah;
- (2) Pendapatan Transfer;
- (3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pasal 3

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 134.090.000.000,00 yang terdiri atas:
 - a. Pajak Daerah
 - b. Retribusi Daerah
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 43.745.000.000,00.
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 8.098.000.000,00
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.837.000.000,00.
- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 78.410.000.000,00.

Pasal 4

- (1) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 43.745.000.000,00., yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel direncanakan sebesar Rp. 780.000.000,00
 - b. Pajak Restoran direncanakan sebesar Rp. 6.000.000.000,00
 - c. Pajak Hiburan direncanakan sebesar Rp. 1.200.000.000,00
 - d. Pajak Reklame direncanakan sebesar Rp. 900.000.000,00
 - e. Pajak Penerangan Jalan direncanakan sebesar Rp. 16.650.000.000,00
 - f. Pajak Parkir direncanakan sebesar Rp. 350.000.000,00
 - g. Pajak Air Tanah direncanakan sebesar Rp. 80.000.000,00
 - h. Pajak Sarang Burung Walet direncanakan sebesar Rp. 35.000.000,00
 - i. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan direncanakan sebesar Rp. 3.750.000.000,00
 - j. PBBP2 direncanakan sebesar Rp. 5.500.000.000,00
 - k. BPHTB direncanakan sebesar Rp. 8.500.000.000,00
- (2) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 8.098.000.000,00, yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum direncanakan sebesar Rp. 2.906.000.000,00
 - b. Retribusi Jasa Usaha direncanakan sebesar Rp. 690.000.000,00
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu direncanakan sebesar Rp. 4.502.000.000,00
- (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.837.000.000,00 yang terdiri atas bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah atas penyertaan modal.
- (4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 78.410.000.000,00, yang terdiri atas:
 - a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan direncanakan sebesar Rp. 10.000.000,00
 - b. Jasa Giro direncanakan sebesar Rp. 1.100.000.000,00
 - c. Pendapatan Bunga direncanakan sebesar Rp. 22.000.000.000,00
 - d. Pendapatan BLUD direncanakan sebesar Rp. 55.300.000.000,00

Pasal 5

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 832.467.846.870,00, yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 768.317.846.870,00
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 64.150.000.000,00

Pasal 6

- (1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 768.317.846.870,00, yang terdiri atas:
 - a. Dana Perimbangan direncanakan sebesar Rp. 747.159.909.870,00
 - b. Dana Desa direncanakan sebesar Rp. 10.082.937.000,00
 - c. Insentif Fiskal direncanakan sebesar Rp. 11.075.000.000,00
- (2) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 64.150.000.000,00, yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Bagi Hasil direncanakan sebesar Rp. 64.150.000.000,00

Pasal 7

- (1) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 5.500.000.000,00, yang terdiri atas:
 - a. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan direncanakan sebesar Rp. 5.500.000.000,00

Pasal 8

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 1.089.797.259.851,00 yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 9

- (1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp. 908.400.280.580,00, yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang Jasa;
 - c. Belanja Hibah; dan
 - d. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 553.159.519.360,00
- (3) Belanja Barang Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 320.069.440.032,00
- (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 34.907.321.188,00
- (5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 264.000.000,00

Pasal 10

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp. 95.928.678.271,00, terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
- (6) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a direncanakan sebesar Rp.240.000.000,00

- (7) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada huruf b direncanakan sebesar Rp.26.042.128.665,00
- (8) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf c direncanakan sebesar Rp.15.893.551.500,00
- (9) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada huruf d direncanakan sebesar Rp.49.488.979.696,00
- (10) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf a direncanakan sebesar Rp.4.264.018.410,00.

Pasal 11

Belanja Tak Terduga sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp. 10.124.500.000,00, yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.

Pasal 12

Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp. 75.343.801.000,00, terdiri atas Belanja Bantuan Keuangan.

Pasal 13

Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 117.739.412.981,00 dalam Pasal 1 huruf c, yang terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 14

- (1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp. 118.739.412.981,00, terdiri atas :
 - a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya;
 - b) Pencairan Dana Cadangan.
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 105.000.000.000,00.
- (3) Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 18.739.412.981,00.

Pasal 15

- (1) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 terdiri atas Penyertaan Modal Daerah.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000,00.

Pasal 16

- (1) Selisih antara Pendapatan Daerah dengan Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar (Rp. 117.739.412.981,00).
- (2) Pembiayaan Netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 117.739.412.981,00

Pasal 17

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alat Penerima, dan Besaran Bagi Hasil;
7. Lampiran VII Rekapitulasi dan Sinkronisasi Perkada Penjabaran APBD yang disajikan Berdasarkan Sumber Dana;

8. Lampiran VIII Daftar Alokasi Anggaran Dana Kapitasi Per FKTP;
9. Lampiran IX Daftar Alokasi Anggaran Dana Bos;
10. Lampiran X Formulir Komitmen Pemerintah Daerah Menganggarkan Barang dan Jasa Serta Belanja Modal Produk Dalam Negeri (PDN), Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)

Pasal 18

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Prabumulih.

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal 29 Desember 2023

Pj. WALIKOTA PRABUMULIH,



H. ELMAN

Diundangkan di Prabumulih pada tanggal 29 Desember 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA PRABUMULIH



ARIS PRIADI

BERITA DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2023 NOMOR 63



KOTA PRABUMULIH
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	134.090.000.000,00
4.1.01	Pajak Daerah	43.745.000.000,00
4.1.01.06	Pajak Hotel	780.000.000,00
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	780.000.000,00
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	780.000.000,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	6.000.000.000,00
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	6.000.000.000,00
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	6.000.000.000,00
4.1.01.08	Pajak Hiburan	1.200.000.000,00
4.1.01.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	1.200.000.000,00
4.1.01.08.05.0001	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	1.200.000.000,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	900.000.000,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	900.000.000,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	900.000.000,00
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	16.650.000.000,00
4.1.01.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	16.400.000.000,00
4.1.01.10.01.0001	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	16.400.000.000,00
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	250.000.000,00
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	250.000.000,00
4.1.01.11	Pajak Parkir	350.000.000,00
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	350.000.000,00
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	350.000.000,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	80.000.000,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	80.000.000,00
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	80.000.000,00
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	35.000.000,00
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	35.000.000,00
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	35.000.000,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	3.750.000.000,00
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	3.750.000.000,00
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	3.750.000.000,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	5.500.000.000,00
4.1.01.15.01	PBBP2	5.500.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	5.500.000.000,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	8.500.000.000,00
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	8.500.000.000,00
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	8.500.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	8.098.000.000,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	2.906.000.000,00
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	0,00
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	0,00
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	200.000.000,00
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	200.000.000,00
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	2.000.000.000,00
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	2.000.000.000,00
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	301.000.000,00
4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran	300.000.000,00
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	1.000.000,00
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	0,00
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	350.000.000,00
4.1.02.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	350.000.000,00
4.1.02.01.07	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	30.000.000,00
4.1.02.01.07.0001	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	30.000.000,00
4.1.02.01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	25.000.000,00
4.1.02.01.11.0001	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	25.000.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	690.000.000,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	660.000.000,00
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	500.000.000,00
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	160.000.000,00
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	5.000.000,00
4.1.02.02.04.0003	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	5.000.000,00
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	25.000.000,00
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	25.000.000,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	4.502.000.000,00
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	2.000.000,00
4.1.02.03.03.0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	2.000.000,00
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	4.500.000.000,00
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	4.500.000.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.837.000.000,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	3.837.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	3.837.000.000,00
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	3.837.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	78.410.000.000,00
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	10.000.000,00
4.1.04.01.05	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	10.000.000,00
4.1.04.01.05.0054	Hasil Penjualan Biota Perairan-Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip)-Ikan Budidaya	10.000.000,00
4.1.04.05	Jasa Giro	1.100.000.000,00
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.100.000.000,00
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.100.000.000,00
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	22.000.000.000,00
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	22.000.000.000,00
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	22.000.000.000,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	55.300.000.000,00
4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	55.300.000.000,00
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	55.300.000.000,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	832.467.846.870,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	768.317.846.870,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	747.159.909.870,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	251.552.000.870,00
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	90.864.286.000,00
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	15.332.985.000,00
4.2.01.01.01.0006	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	70.717.115.000,00
4.2.01.01.01.0007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	346.096.000,00
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	65.868.109.000,00
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	899.091.000,00
4.2.01.01.01.0011	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUUPH)	6.264.377.870,00
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.259.941.000,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	407.321.017.000,00
4.2.01.01.02.0001	DAU	289.040.851.000,00
4.2.01.01.02.0002	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	6.600.000.000,00
4.2.01.01.02.0004	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	42.113.466.000,00
4.2.01.01.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	34.955.452.000,00
4.2.01.01.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	27.311.248.000,00
4.2.01.01.02.0007	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	7.300.000.000,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	88.286.892.000,00
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	29.246.200.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	962.500.000,00
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	36.395.795.000,00
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.237.351.000,00
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	1.916.400.000,00
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	1.273.300.000,00
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	4.067.123.000,00
4.2.01.01.04.0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	406.572.000,00
4.2.01.01.04.0013	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	8.205.213.000,00
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	3.119.868.000,00
4.2.01.01.04.0016	DAK Non Fisik-PK2UKM	420.370.000,00
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	438.200.000,00
4.2.01.01.04.0022	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	598.000.000,00
4.2.01.05	Dana Desa	10.082.937.000,00
4.2.01.05.01	Dana Desa	10.082.937.000,00
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	10.082.937.000,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	11.075.000.000,00
4.2.01.06.01	Insentif Fiskal	11.075.000.000,00
4.2.01.06.01.0001	Insentif Fiskal	11.075.000.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	64.150.000.000,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	64.150.000.000,00
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	64.150.000.000,00
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	17.005.000.000,00
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	11.300.000.000,00
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	21.200.000.000,00
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	145.000.000,00
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	14.500.000.000,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.500.000.000,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.500.000.000,00
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	5.500.000.000,00
4.3.03.02.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	5.500.000.000,00
4.3.03.02.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	5.500.000.000,00
	Jumlah Pendapatan	972.057.846.870,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	908.400.280.580,00
5.1.01	Belanja Pegawai	553.159.519.360,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	349.623.769.951,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	269.828.137.259,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	201.366.707.238,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	68.461.430.021,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	21.036.190.888,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	19.535.419.651,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	1.500.771.237,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	9.809.253.380,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	9.809.253.380,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	16.990.459.390,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	16.990.459.390,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	4.497.314.244,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	3.528.705.672,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	968.608.572,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	13.338.914.165,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	12.270.224.267,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1.068.689.898,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.941.066.516,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.941.066.516,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	3.742.867,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	3.492.595,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	250.272,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	9.331.762.879,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	8.219.362.879,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1.112.400.000,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	595.478.732,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	403.898.732,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	191.580.000,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	2.251.449.631,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1.114.329.631,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	1.137.120.000,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	129.845.622.970,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	129.845.622.970,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	114.845.622.970,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	15.000.000.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	43.138.037.868,00
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	1.106.414.868,00
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	39.000.000,00
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	100.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.03.01.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	30.000.000,00
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	32.500.000,00
5.1.01.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	544.164.868,00
5.1.01.03.01.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	17.500.000,00
5.1.01.03.01.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	4.000.000,00
5.1.01.03.01.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	1.750.000,00
5.1.01.03.01.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	87.500.000,00
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	100.000.000,00
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	150.000.000,00
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	36.395.795.000,00
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	36.395.795.000,00
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.237.351.000,00
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	1.237.351.000,00
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	852.027.000,00
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	852.027.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	3.546.450.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2.833.600.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	646.850.000,00
5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	66.000.000,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	18.105.776.234,00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	585.165.000,00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	585.165.000,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	71.698.200,00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	71.698.200,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	90.742.260,00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	90.742.260,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	58.516.500,00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	58.516.500,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	848.489.250,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	848.489.250,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	98.747.775,00
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	98.747.775,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.307.500.000,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.307.500.000,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	840.000.000,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	840.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	265.301.533,00
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	265.301.533,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	7.429.970.716,00
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	60.000.000,00
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	7.369.970.716,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	4.221.000.000,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	4.221.000.000,00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	288.645.000,00
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	288.645.000,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	795.000.000,00
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	61.997.911,00
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	61.997.911,00
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	8.000.000,00
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	8.000.000,00
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	120.000.000,00
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	120.000.000,00
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	10.000.000,00
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	10.000.000,00
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	595.000.000,00
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	595.000.000,00
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.089,00
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.089,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	601.600.000,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00
5.1.01.88	Belanja Pegawai BOS	5.062.036.671,00
5.1.01.88.88	Belanja Pegawai BOS	5.062.036.671,00
5.1.01.88.88.8888	Belanja Pegawai BOS	5.062.036.671,00
5.1.01.89	Belanja Pegawai BOSP	808.200.000,00
5.1.01.89.02	Belanja Pegawai BOSP-BOP PAUD	499.300.000,00
5.1.01.89.02.0001	Belanja Pegawai BOSP-BOP PAUD Reguler	499.300.000,00
5.1.01.89.03	Belanja Pegawai BOSP-BOP Kesetaraan	308.900.000,00
5.1.01.89.03.0001	Belanja Pegawai BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	308.900.000,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	5.179.475.666,00
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	5.179.475.666,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	5.179.475.666,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	320.069.440.032,00
5.1.02.01	Belanja Barang	59.849.991.749,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	58.294.669.749,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	172.257.500,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	243.455.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5.442.865.750,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	34.565.000,00
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	15.020.000,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	59.330.000,00
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	19.610.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	7.045.437.588,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	759.230.000,00
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	296.784.000,00
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	4.400.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7.187.397.539,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.018.177.326,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	423.950.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	25.625.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	94.084.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	496.853.000,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	332.099.000,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	40.500.000,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	66.800.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	115.448.000,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	5.795.392.000,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	1.293.190.470,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	5.076.942.700,00
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	610.000.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.214.903.500,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	5.418.790.000,00
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	30.240.000,00
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	1.349.099.663,00
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	132.000.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.058.097.713,00
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	200.000.000,00
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	570.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	892.705.000,00
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	104.000.000,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	414.450.000,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	309.700.000,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	780.070.000,00
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	151.200.000,00
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	38.721.000,00
5.1.02.01.02.0004	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	29.221.000,00
5.1.02.01.02.0006	Belanja Komponen-Komponen Lainnya	9.500.000,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	1.516.601.000,00
5.1.02.01.04.0024	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Mesin Bor	90.000.000,00
5.1.02.01.04.0035	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	196.970.000,00
5.1.02.01.04.0116	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	7.466.000,00
5.1.02.01.04.0117	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	214.725.000,00
5.1.02.01.04.0118	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	165.710.000,00
5.1.02.01.04.0121	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	10.000.000,00
5.1.02.01.04.0135	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Cetak	9.000.000,00
5.1.02.01.04.0237	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	38.440.000,00
5.1.02.01.04.0406	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	76.340.000,00
5.1.02.01.04.0411	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	48.150.000,00
5.1.02.01.04.0621	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	540.000.000,00
5.1.02.01.04.0710	Belanja Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum	119.800.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	88.813.769.890,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	61.527.505.294,00
5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	893.220.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.306.254.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	10.881.290.000,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	218.900.000,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	9.200.000,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	52.800.000,00
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	4.800.000,00
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	664.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	3.610.800.000,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	494.600.000,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	1.484.750.000,00
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	150.000.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	24.100.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	701.400.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	10.795.662.328,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	4.033.857.052,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	34.800.000,00
5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	34.400.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	47.497.500,00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	165.000.000,00
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	120.000.000,00
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	148.400.000,00
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	138.000.000,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	336.861.000,00
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	2.500.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	2.597.000.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	626.940.000,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	760.760.140,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	16.278.420.030,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	697.995.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.169.898.244,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	2.500.000,00
5.1.02.02.01.0066	Belanja Registrasi/Keanggotaan	13.000.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	662.900.000,00
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	365.000.000,00
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	16.246.417.096,00
5.1.02.02.02.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	250.000.000,00
5.1.02.02.02.0002	Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	13.653.360.000,00
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	567.840.000,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	45.000.000,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	255.172.000,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	145.440.000,00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	325.600.000,00
5.1.02.02.02.0009	Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS	500.005.096,00
5.1.02.02.02.0012	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan	504.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.649.285.500,00
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	68.150.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	254.000.000,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	60.640.000,00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	961.645.500,00
5.1.02.02.04.0121	Belanja Sewa Alat Pendingin	18.000.000,00
5.1.02.02.04.0404	Belanja Sewa Komputer Jaringan	11.000.000,00
5.1.02.02.04.0410	Belanja Sewa Peralatan Jaringan	260.100.000,00
5.1.02.02.04.0494	Belanja Sewa Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	15.750.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	938.350.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	525.200.000,00
5.1.02.02.05.0036	Belanja Sewa Taman	174.165.000,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	238.985.000,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	169.330.000,00
5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik	169.330.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	4.196.350.000,00
5.1.02.02.08.0003	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	419.500.000,00
5.1.02.02.08.0007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	471.100.000,00
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	18.000.000,00
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	1.109.000.000,00
5.1.02.02.08.0014	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	400.000.000,00
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	845.750.000,00
5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	909.000.000,00
5.1.02.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	24.000.000,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	570.000.000,00
5.1.02.02.09.0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	40.000.000,00
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	530.000.000,00
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	173.620.000,00
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	173.620.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	3.342.912.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	730.960.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	2.244.090.000,00
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	367.862.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	8.024.125.000,00
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	70.000.000,00
5.1.02.03.01.0004	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	70.000.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.552.141.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3.933.133.000,00
5.1.02.03.02.0086	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi	82.000.000,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	1.503.580.000,00
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	30.000.000,00
5.1.02.03.02.0375	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Uji Perangkat	3.428.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.051.984.000,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1.421.984.000,00
5.1.02.03.03.0032	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	540.000.000,00
5.1.02.03.03.0037	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	90.000.000,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	350.000.000,00
5.1.02.03.04.0125	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	350.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	80.376.084.849,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	79.624.198.849,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	62.647.215.732,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	15.516.981.117,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.372.702.000,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	87.300.000,00
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	751.886.000,00
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri	751.886.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	14.930.686.500,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.239.096.500,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	117.096.500,00
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	210.000.000,00
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	912.000.000,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	13.691.590.000,00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	3.394.090.000,00
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	10.297.500.000,00
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	18.789.485.110,00
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	18.789.485.110,00
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	18.789.485.110,00
5.1.02.89	Belanja Barang dan Jasa BOSP	1.112.923.600,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.89.02	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD	1.112.923.600,00
5.1.02.89.02.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Reguler	1.112.923.600,00
5.1.02.90	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	342.923.000,00
5.1.02.90.01	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	342.923.000,00
5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	342.923.000,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	47.829.450.334,00
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	47.829.450.334,00
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	47.829.450.334,00
5.1.05	Belanja Hibah	34.907.321.188,00
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	8.129.968.000,00
5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	6.500.008.000,00
5.1.05.01.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	6.500.008.000,00
5.1.05.01.02	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	1.629.960.000,00
5.1.05.01.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	1.629.960.000,00
5.1.05.02	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	1.837.895.500,00
5.1.05.02.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	1.837.895.500,00
5.1.05.02.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	1.837.895.500,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	24.000.755.770,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	24.000.755.770,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	24.000.755.770,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	938.701.918,00
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	938.701.918,00
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	938.701.918,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	264.000.000,00
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	264.000.000,00
5.1.06.03.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	264.000.000,00
5.1.06.03.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	264.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	95.928.678.271,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	240.000.000,00
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	240.000.000,00
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	240.000.000,00
5.2.01.01.01.0007	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	240.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.042.128.665,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	9.947.910.000,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	9.947.910.000,00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	5.632.910.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	3.775.000.000,00
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	540.000.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.928.296.522,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	663.393.000,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	307.800.000,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	355.593.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	2.124.750.722,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	1.132.670.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	514.140.661,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	477.940.061,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	140.152.800,00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	21.000.000,00
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	119.152.800,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	9.550.000,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	2.600.000,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	2.600.000,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	6.950.000,00
5.2.02.06.02.0009	Belanja Modal Alat Komunikasi Digital dan Konvensional	6.950.000,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	3.408.630.434,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	2.958.630.434,00
5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	2.958.630.434,00
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	450.000.000,00
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	450.000.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	1.502.715.500,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	828.080.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	248.800.000,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	579.280.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	674.635.500,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	674.635.500,00
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	2.592.216.000,00
5.2.02.13.01	Belanja Modal Sumur	2.592.216.000,00
5.2.02.13.01.0002	Belanja Modal Sumur Pemboran	2.592.216.000,00
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	3.361.736.209,00
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	3.361.736.209,00
5.2.02.88.88.8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	3.361.736.209,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	2.291.074.000,00
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	2.291.074.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	2.291.074.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	15.893.551.500,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	15.893.551.500,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	15.893.551.500,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	6.852.571.500,00
5.2.03.01.01.0008	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	184.500.000,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	8.681.480.000,00
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	175.000.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	49.488.979.696,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	40.656.784.000,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	40.656.784.000,00
5.2.04.01.01.0004	Belanja Modal Jalan Kota	40.656.784.000,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	4.559.355.696,00
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	4.559.355.696,00
5.2.04.02.04.0001	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	4.559.355.696,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	630.000.000,00
5.2.04.03.06	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik	630.000.000,00
5.2.04.03.06.0004	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik Lainnya	630.000.000,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	3.642.840.000,00
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	3.642.840.000,00
5.2.04.04.02.0002	Belanja Modal Jaringan Distribusi	3.320.000.000,00
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	322.840.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.264.018.410,00
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	4.264.018.410,00
5.2.05.88.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	4.264.018.410,00
5.2.05.88.88.8888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	4.264.018.410,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.124.500.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	10.124.500.000,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	10.124.500.000,00
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	10.124.500.000,00
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	10.124.500.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	75.343.801.000,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	75.343.801.000,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	75.343.801.000,00
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	75.343.801.000,00
5.4.02.05.02.0004	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	10.082.937.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.4.02.05.02.0005	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	65.260.864.000,00
	Jumlah Belanja	1.089.797.259.851,00
	Total Surplus/(Defisit)	-117.739.412.981,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	118.739.412.981,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	100.000.000.000,00
6.1.01.02	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	14.000.000.000,00
6.1.01.02.01	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat	14.000.000.000,00
6.1.01.02.01.0006	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Gas bumi	14.000.000.000,00
6.1.01.03	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	11.000.000.000,00
6.1.01.03.01	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Pendapatan Hibah	11.000.000.000,00
6.1.01.03.01.0001	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	1.000.000.000,00
6.1.01.03.01.0002	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	10.000.000.000,00
6.1.01.05	Penghematan Belanja	75.000.000.000,00
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	65.000.000.000,00
6.1.01.05.01.0001	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN	35.000.000.000,00
6.1.01.05.01.0007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	30.000.000.000,00
6.1.01.05.02	Penghematan Belanja-Belanja Modal	5.000.000.000,00
6.1.01.05.02.0025	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan	5.000.000.000,00
6.1.01.05.03	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00
6.1.01.05.03.0001	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	18.739.412.981,00
6.1.02.01	Pencairan Dana Cadangan	18.739.412.981,00
6.1.02.01.01	Pencairan Dana Cadangan	18.739.412.981,00
6.1.02.01.01.0001	Pencairan Dana Cadangan	18.739.412.981,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.000.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.000.000.000,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	1.000.000.000,00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	1.000.000.000,00
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	1.000.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	1.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	117.739.412.981,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Kota Prabumulih, 29 Desember 2023
Pj Walikota

H. ELMAN